



Media: Merapi

Hari: Jumat

Tanggal: 23 Oktober 2020

Halaman: 1

Media Massa : **Merapi** hari : **Jumat** tanggal : **23/10/2020** halaman : **1**

ANTREAN BANTUAN MARAK DI KANTOR BRI, PEMDA MINTA JAGA JARAK

PNS Positif Corona, Wawali Kota Yogya Ikut Jalani Swab

UMBUHARJO (MERAPI)- Wakil Walikota Yogya Heroe Poerwadi menyebut kasus Covid-19 yang muncul di perkantoran di lingkup Pemkot Yogyakarta dinilai bisa dikendalikan. Dia mengakui ada beberapa kasus positif Covid-19 yang pernah muncul di perkantoran wilayah Pemkot Yogya, seperti di Dinas Lingkungan Hidup, Dinas Kesehatan, Dinas Komunikasi Informatika dan Persandian (Diskominfosan) serta tingkat kelurahan.

***Bersambung ke halaman 9**

Warga mengantre pencairan bantuan di bank BRI Jalan Pasar Kembang, Kamis (22/10). Pemda DIY mewanti-wanti agar antrean menerapkan protokol kesehatan.

"Risiko perkantoran beberapa ada tapi tidak menyebar banyak. Hanya satu dua. Semoga ini karena protokol kesehatan yang ketat diterapkan. Tapi ada kasus muncul kami segera lakukan tracing dan blocking agar tidak menyebar," terangnya kepada wartawan, Kamis (22/10).

Diakui seminggu lalu ada satu Pegawai Negeri Sipil (PNS) di Diskominfosan Kota Yogyakarta yang dinyatakan positif Covid-19 tanpa gejala. Kasus itu diketahui setelah suami PNS itu meninggal karena komorbid dan positif Covid-19. Penelusuran dan pelacakan dilakukan terhadap orang yang kontak erat. Hasilnya di lingkungan keluarga PNS, satu anak positif Covid-19. Dua orang di Diskominfosan Kota Yogyakarta sempat diminta isolasi mandiri.

"Kami sudah swab 12 orang yang kontak erat. Termasuk saya sudah di swab. Hasilnya semua negatif. Besok semua sudah masuk kerja kembali. Mitigasi di perkantoran sejak awal kami tekankan protokol kesehatan di kantor Pemkot Yogya harus lebih baik," tegas Heroe.

Terkait perkembangan kasus di Kota Yogya, Heroe menyebut kluster Covid-19 pada sebuah perkantoran swasta di Kabupaten Sleman menyumbang penambahan kasus positif corona di Kota Yogyakarta. Mengingat sebagian pekerja yang terpapar virus corona dari kluster perkantoran di Sleman adalah warga Kota Yogyakarta.

"Kasus Covid-19 di Yogya cenderung melandai. Tapi nak lagi demam," kata Ketua Harian Satgas Penanganan Covid-19 Kota Yogyakarta itu.

Dia menyebut sampai kemarin dari kluster perkantoran swasta di Kabupaten Sleman sebanyak 15 orang di antaranya adalah warga Kota Yogyakarta.

Kota Yogyakarta, diharapkan tidak ada penambahan kasus di Kota Yogyakarta dari kluster tersebut. Pihaknya menyerahkan kepada pemangku wilayah terkait kluster perkantoran swasta di Sleman yang jumlahnya cukup banyak.

Sementara itu sejumlah kantor Bank BRI terpantau ramai dikunjungi para penerima bantuan presiden (banpres) produktif untuk pelaku usaha mikro senilai Rp 2,4 juta. Tak ayal banyak yang terlihat berdesakan dan tidak mengindahkan jaga jarak karena tidak ada jadwal pengambilan. Hal ini berpotensi tersebarnya virus Covid-19 di Yogyakarta.

Sekda DIY, Baskara Aji mengatakan hal tersebut wajar terjadi, sebab pengambilan bantuan diinformasikan langsung melalui gawai penerima oleh pemerintah pusat sehingga bisa diambil di kantor BRI mana saja.

"Sehingga itu merepotkan teman-teman di bank untuk mengatur protokol kesehatannya. Karena informasi pengambilan langsung dari Jakarta di infokan melalui SMS ke warga," ungkapnya, Kamis (22/10) di Kompleks Kepatihan.

Menurutnya, apabila diserahkan kepada Pemerintah Daerah (Pemda) akan jauh lebih mudah diatur dan dikontrol sebab dapat diatur dan dijadwalkan.

"Karena kami bisa atur berapa jatah penerima perhari, supaya tidak berdesakan," imbuhnya. Sementara itu, Kepala Satpol PP DIY, Noviar Rahmad mengatakan pihaknya telah menginstruksikan kepada Satpol PP Kabupaten Kota untuk berpatroli meminta pengelola Bank BRI untuk tetap melaksanakan protokol kesehatan Covid-19.

"Sudah kita turunkan untuk patroli di Kabupaten Kota. (Kami minta kepada pengelola BRI untuk jaga jarak," ungkapnya. Noviar mengatakan pihak bank wajib dan bertanggung jawab penuh untuk mengatur pemberian bantuan sesuai protokol kesehatan, apalagi wilayah kerjanya sangat luas dan tersebar di banyak Kecamatan. Apabila tidak patuh, akan ditindak sesuai dengan Peraturan Gubernur (pergub) Nomor 77 Tahun 2020.

"Yang bertanggungjawab pengelola wajib mengatur jaga jarak di setiap unit kerjanya. Karena kan ada di seluruh BRI kecamatan," imbuhnya. (Tri/C4)-d

Sambungan halaman 1

Instansi	Nilai Berita	Sifat	Tindak Lanjut
1. Dinas Kesehatan	Netral	Biasa	Untuk Diketahui

Yogyakarta, 31 Agustus 2026
Kepala

Ig. Trihastono, S.Sos. MM
NIP. 19690723 199603 1 005